

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak tahun 1949, Tiongkok telah berbagi perbatasan dengan negara tetangganya bahkan 14 negara diantaranya terjadi sengketa. Namun beberapa kasus sudah terselesaikan seperti dengan Myanmar (1960), Nepal (1961), Korea Utara (1962), Mongolia (1962), Pakistan (1963), Laos (1991) bahkan Vietnam (1999) dan Rusia (1991-94) (Richards, 2015). Penyelesaian sengketa mayoritas lebih menekankan kepada nilai hukum internasional yang damai dan pendekatan diplomasi, terkecuali Vietnam dan Rusia dengan jalan militer (Hongyi, 2009, p. 487).

Hubungan diplomasi kedua negara ini dimulai sejak 31 Desember 1949 bertepatan ketika India mengakui Tiongkok sebagai negara komunis. Namun satu dekade hingga 8 September 1959 menjadi fase buruk bagi kedua negara khususnya mengenai isu perbatasan. Kawasan perbatasan dengan India menjadi salah satu sengketa perbatasan yang belum diselesaikan oleh Tiongkok hingga saat ini (Kumar M. , 2015, p. 21).

Kawasan perbatasan yang disengketakan terbagi menjadi 3 sektor besar yakni Sektor Timur, Tengah dan Barat. Sektor Timur terdiri dari seluruh area terluar perbatasan (Outer Line) pra 1914 dan McMahon Line. Sektor Tengah terdiri dari kawasan perbatasan yang melewati Tibet-Kashmir-Punjab dan Nepal-Tibet-Uttar Pradesh. Sementara Sektor Barat meliputi kawasan perbatasan yang melewati Aksai

Chin yang diklaim India sebagai bagian dari Ladakh dan Tiongkok sebagai bagian dari Xinjiang (Xuecheng, 2011, pp. 148-149).

Sengketa perbatasan dimulai sejak tahun 1954 ketika Tiongkok mengklaim wilayah Barahoti dan memprotes keberadaan pasukan India di wilayah tersebut. India memprotes atas klaim tersebut karena telah melanggar perjanjian Pancshheel (Ahmed, 2015, p. 212). Isi dari perjanjian tersebut mengandung lima prinsip yakni menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, tidak ada agresi militer, tidak campur tangan urusan internal, kesetaraan dan keuntungan bersama serta koeksistensi perdamaian (External Publicity Division Ministry of External Affairs Government of India, 1954).

Sengketa di wilayah Barahoti berlanjut hingga tahun 1956 dengan ekspansi klaim Tiongkok meluas ke Tunjun La dan Hupsang Khud. Pemimpin kedua negara Zhou Enlai dan Nehru bertemu untuk melakukan kesepakatan tidak menurunkan pasukan militer di area perbatasan. Namun pada tahun 1958 ekspansi Tiongkok mulai meluas ke area Ladakh, Kashmir dengan membuat bangunan permanen dan semi permanen. Aksi klaim juga berlanjut ke wilayah Laphthal dan Sangchamalla di Uttar Pradesh dengan membangun pos jaga (Ahmed, 2015, p. 213) .

Pada tahun 1959, Tiongkok mulai melanggar perjanjian Pancshheel dan berdampak pada klaim 40.000 mil dari teritorial India oleh Tiongkok. Tiongkok mulai memaksa tentara India untuk mundur dari beberapa wilayah perbatasan seperti Khinzemane, Longju dan Ladakh. Pemerintah Tiongkok menolak garis perbatasan tradisional yang disebut McMahon Line (kini Line of Actual Control) yang dibentuk ketika masa Imperialis Inggris (Ahmed, 2015, pp. 214-215). Pada tahun 1960-1961

keduanya melakukan negosiasi di 3 tempat berbeda yakni Peking, New Delhi serta Rangoon dan menghasilkan publikasi atas garis perbatasan resmi. Namun Tiongkok kembali melanggar dan memperluas ekspansi hingga ke wilayah Chemokarpola, Nyagzu dan Dambuguru. Pertempuran besar pada 20 – 21 September 1962 menjadi puncak konflik dan sekaligus menghentikan aksi klaim sementara serta memulai hubungan diplomasi secara damai. (Ahmed, 2015, p. 217).

Perubahan arah penyelesaian sengketa dimulai sejak tahun 1980 yang lebih representatif bagi kedua belah pihak. Kedua negara setuju untuk melakukan negosiasi sesuai dengan alur politik dan prinsip yang jelas untuk mencari keadilan dan solusi yang dapat diterima. Perkembangan hubungan bilateral antar dua negara besar di Asia ini dapat lebih mengatur situasi geopolitik di kawasan (Xuecheng, 2011, pp. 147-148). Terdapat 3 tahap proses diplomasi kawasan perbatasan dengan satu dekade setiap tahapnya. Pertama, pada tahun 1980 dengan momentum Perdana Menteri India Rajiv Gandhi's mengunjungi China pada Desember 1988. Kedua, tahun 1990 dengan momentum tes nuklir India pada tahun 1998 dan terakhir dengan momentum Presiden India Pratibha Patil mengunjungi China guna memperingati 60 tahun hubungan diplomatik China India pada Mei 2010 (Garver, *The Unresolved Sino-Indian Border Dispute: An Interpretation*, 2011, p. 100).

Terdapat 8 kali pertemuan untuk negosiasi antara tahun 1981 hingga 1988 yang secara keseluruhan perbincangan lebih mengarah kepada mekanisme penyelesaian sengketa. Tiongkok menerima penawaran India untuk menyelesaikannya secara bertahap dengan sistem sektor per sektor. Sistem ini dinilai India lebih efektif dengan

mengutamakan sektor yang paling mudah yakni sektor timur. Namun pada tahap akhir negosiasi tahun 1988, Tiongkok justru menunjukkan klaim kembali atas sektor timur (Singh Z. D., *After the Hiatus: India-China Border Diplomacy since the 1970s*, 2011, p. 87). Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan Tiongkok pada kesepakatan yang telah dibuat.

Sejak tahun 1998 – 2003 telah dilakukan *Joint Working Group* antar delegasi kedua negara untuk merancang instrumen membantu stabilitas kawasan *Line of Actual Control* (LAC). Tahap penentuan dilaksanakan pada bulan Juni 2003 ketika Perwakilan Khusus tiap negara datang untuk memimpin 13 ronde *Special Representative Meeting* (Singh Z. D., *After the Hiatus: India-China Border Diplomacy since the 1970s*, 2011, p. 89). Hal ini merupakan langkah positif kedua negara untuk memperjelas langkah diplomasi yang dilakukan.

Pada April 2005 telah dilakukan penandatanganan sebuah kesepakatan yang mengatur tentang parameter politik dan prinsip dasar penyelesaian sengketa perbatasan. Tiongkok dan India menandatangani *Agreement on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the India China Boundary Question* yang disusun sejak tahun 2003. Kesepakatan ini berisi 10 pedoman yang merupakan dasar dari pola pengaturan perbatasan secara damai dan cara menyelesaikannya (Hsu, 2008, pp. 10-11). Lima prinsip dasar yang tertulis dalam perjanjian *Panchsheel* menjadi basis dari perjanjian ini yang mewakili kepentingan kedua belah pihak. Kesepakatan ini juga merupakan penekanan komitmen melaksanakan Perjanjian yang ditandatangani tahun 1993 tentang Pemeliharaan

Perdamaian dan Ketenangan di Sepanjang *Line of Actual Control* (LAC) di Wilayah Perbatasan India-China serta Perjanjian tahun 1996 tentang Langkah-Langkah Membangun Keyakinan di Lapangan Militer di sepanjang Jalur Pengendalian Aktual (Maxwell, 2014, pp. 289-290).

Sejak kesepakatan ini terbentuk, hubungan diplomasi Tiongkok-India meningkat signifikan. Pada tahun yang sama menandatangani perjanjian *Strategic Partnership for Peace and Prosperity*. Berlanjut pada tahun 2006 dideklarasikan sebagai *Sino-Indian Friendship Year* dan 2007 sebagai *Year of Friendship*. Selain itu dalam ranah sengketa perbatasan, wilayah Nathu La dibuka kembali pada 4 Juli 2006 setelah 44 tahun ditutup. Perdagangan antar dua negara juga meningkat pada tahun 2008 mencapai 38 miliar dollar Amerika yang sebelumnya tahun 1991 hanya 260 juta dollar Amerika (Huchet, 2008, p. 50).

Kesepakatan yang sudah terjalin ternyata tidak berjalan lama dengan munculnya konflik baru di kawasan perbatasan. Pada tahun 2009, Tiongkok memprotes kedatangan Perdana Menteri India Manmohan Singh ke Arunachal Pradesh karena termasuk wilayah sengketa. Kemudian pada tahun berikutnya 2010 kedua negara sama-sama menolak kunjungan dari perwakilan negara. Melihat keadaan ini, Tiongkok mengusulkan kembali rencana kesepakatan pada tahun 2013 tentang *Border Defence Cooperation Agreement* (Chansoria, *India-China Border Agreement Much Ado About Nothing*, 2014). Kesepakatan ini merupakan penekanan terhadap perjanjian 1993, 1996 dan 2005. Selain itu, kesepakatan ini dibentuk untuk memperjelas skema

definisi *Line of Actual Control* (LAC) yang berbeda antara Tiongkok ataupun India (Subramanyam, 2013).

Perundingan yang telah dilaksanakan sejak Parameter Politik dan Prinsip Panduan Penyelesaian Pertanyaan Batas Tiongkok India ditandatangani pada tahun 2005 ternyata tidak efektif. Sengketa di kawasan perbatasan masih terus terjadi bahkan kedua negara masih tegas dengan prinsipnya masing-masing. Peristiwa *Docklam Standoff* pada 28 Agustus 2017 menjadi momentum penanda kebuntuan usaha diplomasi sengketa perbatasan oleh kedua negara (Panda, a, 2017).

Klaim Tiongkok atas Docklam berdasar pada Konvensi Calcutta 1890 antara Tiongkok dengan Britain. Sementara posisi India merupakan sekutu dari Bhutan yang didasari pada A New Friendship Treaty pada tahun 2007. Bhutan meminta bantuan India untuk memandu proses diplomatik dengan Tiongkok (Bo, 2018).

*Docklam Standoff* ditandai dengan mundurnya tentara Tiongkok dan India di kawasan perbatasan Docklam. Peristiwa ini dimulai dengan perlawanan tentara India atas masuknya tentara Tiongkok *People's Liberation Army* (PLA) di kawasan perbatasan Docklam untuk membangun jalan di kawasan tersebut. Aksi protes tidak hanya dilakukan oleh India namun juga oleh Bhutan, negara yang mempunyai hak territorial atas Docklam (Panda, b, 2017). Kemudian keadaan diperparah ketika Kementerian Luar Negeri Tiongkok merilis peta yang menggambarkan Docklam merupakan bagian dari kedaulatan Tiongkok. Selain itu Tiongkok mengeluarkan berbagai dokumen yang disebar ke media internasional termasuk tuduhan bahwa

India menggunakan Bhutan sebagai dalih intervensi diplomatik serta menyebarkan stereotip bahwa India merupakan ancaman bagi Bhutan (Sajjanhar, 2017).

Kebuntuan diplomasi antara Tiongkok dan India semakin parah seiring dengan masuknya angkatan militer di kawasan Docket. Aksi saling ancam hingga adu kekuatan militer terjadi antar kedua negara di kawasan perbatasan. Tiongkok memaksa mundur tentara India untuk keluar dari wilayah sengketa, begitupun sebaliknya. Keadaan ini kemudian mengalami kebuntuan pada 28 Agustus 2017 dan kedua negara sepakat menarik mundur militer dari kawasan tersebut untuk memulai kembali proses negosiasi secara damai (Patranobis, 2018).

Dilihat dari data dan sejarah tersebut penulis semakin tertarik untuk meneliti kegagalan dalam berbagai perundingan yang dilakukan antara Tiongkok dan India semenjak Perjanjian 2005 hingga munculnya Peristiwa *Docket Standoff 2017*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang mengenai Analisis Penyelesaian Sengketa Perbatasan China-India maka dapat ditarik rumusan masalah:

Mengapa sengketa perbatasan China-India belum dapat terselesaikan mulai dari perjanjian 2005 hingga peristiwa *Docket Standoff* tahun 2017?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kegagalan dalam perundingan yang dilakukan Tiongkok India pada tahun 2005 hingga 2017.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya proses penyelesaian sengketa perbatasan.
3. Untuk mengetahui usaha kedua belah pihak dalam menemukan resolusi penyelesaian sengketa.

#### **1.4 Signifikansi**

Penelitian ini penting untuk dilakukan melihat kasus ini melibatkan dua negara besar di Asia, Tiongkok dan India yang tak kunjung selesai sejak tahun 1954. Hal ini perlu dikhawatirkan karena Tiongkok sudah menyelesaikan hampir seluruh sengketa perbatasan dengan negara tetangganya terkecuali India dan Bhutan. Sengketa dua negara besar ini jika tidak cepat terselamatkan maka akan mengganggu stabilitas regional bahkan Asia.

Selain itu penelitian ini berbeda dengan beberapa artikel yang fokus pada sejarah dan awal mula terjadinya sengketa perbatasan mulai dari warisan sengketa kerajaan Inggris dan berhenti pada tahun 2005 (Maxwell, 2011, p. 71) atau membahas tentang dinamika perkembangan sengketa perbatasan hanya pada masa pemerintahan Modi di India dan Xi Jinping di China (Jha, 2017, pp. 158-159). Dalam artikel lain membahas pada sudut pandang masing-masing negara seperti sudut pandang Tiongkok terhadap sengketa perbatasan (Hellstrom & Korkmaz, 2011, pp. 11-12) begitupun dengan sudut pandang India (Eekelen, 1967, p. 79).

Dalam penelitian ini penulis mencoba melihat pandangan berbeda dengan menganalisis dinamika proses perundingan antara kedua belah pihak khususnya tentang sengketa perbatasan. Namun penelitian ini lebih difokuskan kepada hal yang



menjadi kekurangan ataupun faktor yang menghambat sehingga perundingan selalu gagal. Perundingan yang dilakukan selama ini belum menemukan hasil pasca ditandatanganinya Perjanjian mengenai Parameter Politik dan Pedoman Prinsip Penyelesaian Sengketa pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang telah dibuat nyatanya belum efektif untuk menjadi landasan dalam setiap perundingan sehingga selalu gagal terbukti dengan munculnya peristiwa *Docklam Standoff 2017*. Penelitian ini nantinya akan melihat dari setiap perundingan yang dilakukan agar menjadi penelitian yang lebih rinci dan terstruktur.

### **1.5 Cakupan Penelitian**

Penelitian ini akan fokus pada analisis penyelesaian sengketa dan penyebab kegagalan dalam setiap usaha perundingan. Subyek yang terlibat yakni Tiongkok dan India serta Tibet sebagai negara yang berdiri di kawasan perbatasan kedua negara tersebut. Periode yang diambil sejak tahun 2005 ketika momentum penandatanganan dan pengumuman *Agreement on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the India China Boundary Question*. Perjanjian ini mengatur dasar-dasar parameter politik dan panduan prinsip-prinsip yang dipakai dalam setiap perundingan yang membahas mengenai penyelesaian sengketa perbatasan antara Tiongkok dan India. Peristiwa *Docklam Standoff 2017* diambil sebagai momentum terbaru penurunan hubungan diplomasi dan proses perundingan antar kedua negara.

### **1.6 Kajian Pustaka**

Xuecheng menjelesakan tentang klarifikasi *Line of Actual Control (LAC)* dan Implementasi *Confidence Building Measures (CBMs)*. LAC penting untuk dibahas

karena merupakan prinsip dasar dari garis perbatasan antara Tiongkok dan India. Pasca *Special Representatives Meetings* (SRM) tahun 1988 dan 1991, kedua negara merubah arah negosiasi dari sengketa perbatasan ke identifikasi LAC yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. SRM tentang LAC ini diadakan karena 8 ronde pertemuan yang dimulai sejak tahun 1980 hingga 1988 membahas tentang sengketa perbatasan tidak menemukan hasil. Pada tahun 1993 perjanjian tentang kepastian *Line of Actual Control* (LAC) ditandatangani oleh kedua negara. Sejak adanya kesepakatan tentang LAC ini, kedua negara bersedia menyelesaikan sengketa perbatasan dengan damai dan tenang serta meminimalisir penggunaan militer di kawasan perbatasan. Kedua negara menerapkan *Confidence Building Measures* (CBMs) dalam menjalankan kesepakatan LAC ini. Implementasi CBMs dalam kesepakatan LAC ini, kedua negara melakukan *Joint Working Group* yang diwakili diplomat serta tentara militer. Kesepakatan LAC dan implementasi CBMs menemukan tiga hasil signifikan pada sengketa perbatasan. Pertama, India menerima bahwa Tibet merupakan bagian dari Tiongkok dan melarang orang Tibet di India untuk melakukan politik anti Tiongkok. Selain itu Tiongkok juga mengakui bahwa wilayah Sikkim merupakan bagian dari kedaulatan India dengan melakukan penandatanganan kesepakatan dagang lintas batas dengan India. Kedua, Tiongkok dan India menandatangani kesepakatan parameter politik dan prinsip aturan penyelesaian sengketa perbatasan tahun 2005. Ketiga, pasca kesepakatan 2005 akan ada pertemuan representative masing-masing negara yang diadakan setiap tahun (Xuecheng, 2011, pp. 155-156).

Chansoria menekankan *Confidence Building Measures* (CBMs) sebagai langkah pasif Tiongkok India dalam setiap perundingan maupun perjanjian yang dilakukan. CBM digunakan oleh kedua belah pihak untuk menunda penyelesaian masalah sampai tujuan *balance of power* antara keduanya tercapai. *Balance of power* ini didorong dengan potensi negara berupa ekonomi maupun militer. Hal ini dipicu dengan kenaikan India sebagai kekuatan regional, walaupun Tiongkok mengakuinya namun belum siap menerima Asia sebagai multipolar. Dalam hal ini Tiongkok mengambil langkah realis yang menjalankan langkah menyerang (*offensive/ hard power*) selagi berjalannya proses diplomasi bertahan (*defensive/ soft power*). *Offensive* dengan memperkuat kekuatan nasional yang komprehensif di ranah militer dan ekonomi selagi aspek *Defensive* berjalan dengan diplomasi ataupun budaya. Konsep ini kemudian dibawa oleh Monica kedalam setiap perundingan yang sudah dilaksanakan dalam 3 fase yakni Fase 1 (1981-1987), Fase 2 (1988-2003) dan Fase 3 (2003-2016). Hal ini juga digunakan untuk menganalisis kegagalan dalam setiap perundingan ataupun kesepakatan (Chansoria, 2016, pp. 1-5).

Joshi lebih menekankan sikap keras Tiongkok terhadap upaya penyelesaian sengketa perbatasan dengan India. Hal ini juga menjadi salah satu faktor kegagalan setiap usaha perundingan yang dilakukan oleh kedua negara. Tepat setahun setelah penandatanganan perjanjian tahun 2005, aksi klaim secara keras disampaikan oleh perwakilan Tiongkok bahwa Arunachal Pradesh termasuk Tawang merupakan wilayah kedaulatan Tiongkok. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2007 yang disampaikan oleh menteri luar negeri Tiongkok. Aksi saling klaim ini memuncak pada tahun 2009 ketika

Tiongkok memblokir 2,9 miliar dollar Amerika pinjaman uang dari Asian Development Bank. Hal ini kemudian memicu India untuk meningkatkan jumlah militer dikawasan perbatasan dengan menurunkan 60.000 tentara dan 18 pesawat jet tempur yang kemudian di respon kembali oleh Tiongkok dengan menurunkan 400.000 tentara di kawasan tersebut. Perjanjian tahun 2005 menjadi kesepakatan yang mudah diacuhkan, aksi klaim ini justru telah melanggar salah satu nilai kesepakatan yakni dalam mencapai penyelesaian sengketa batas maka kedua pihak harus menjaga kepentingan populasi yang sudah menetap di kawasan tersebut. Pada tahun 2010, Kepala Angkatan Darat India Deepak Kapoor menjelaskan bahwa klaim yang dilakukan oleh masing-masing negara hanya persepsi karena tidak ada garis perbatasan pasti yang disetujui oleh kedua belah pihak. LAC yang tidak jelas menjadi alasan Tiongkok untuk terus melakukan klaim di lapangan maupun di meja perundingan (Koshi, 2011, p. 563).

Westcott lebih spesifik membahas tentang pengaruh *State Prestige* dalam sengketa perbatasan Tiongkok dan India. Dalam penelitian ini Stephen fokus ke *Interstate Border Disputes* (IBDs). Menurutnya *State Prestige* atau gengsi suatu negara adalah tangan tak terlihat yang memotivasi aktor dalam urusan internasional dan membangun hirarki yang tidak resmi dalam sistem internasional. Sifat ini nantinya akan memperkokoh dengan kepentingan masing-masing sehingga sulit untuk menemukan resolusi penyelesaian masalah hal ini terlihat dari beberapa perjanjian dan perundingan yang dilakukan selalu hilang dengan kepentingan dan gengsi masing-masing negara. Selain membahas gengsi atau *state prestige* sebagai bagian utama yang

menghambat jalannya perundingan, penelitian ini juga membahas tiga faktor lainnya yakni nilai atau simbol dari wilayah tersebut, dorongan politik domestik dan lingkungan geopolitik yang dioperasikan oleh negara. Penelitian ini akan terbagi dalam empat sesi yakni pertama, penguraian logika dari tiga faktor penyebab yang sering diidentifikasi oleh para ahli untuk menentukan perilaku negara terhadap sengketa perbatasan negara, kedua, implementasi gagasan ini ke kasus perbatasan Tiongkok dan India untuk menguraikan kekurangan sehingga penyelesaian kasus terhambat, ketiga, penguraian tentang pengaruh gengsi dalam urusan internasional khususnya IBD, keempat, membahas tentang dampak pengaruh *state prestige* memaksa kedua negara tetap keras kepala dan sulit untuk didamaikan (Westcott, 2015, pp. 1-3)

Wang lebih menjelaskan tentang keputusan negara dalam kasus ini Tiongkok dan India untuk menolak melakukan perubahan status quo dalam sengketa perbatasan. Selain itu juga melakukan pembahasan tentang alasan negara untuk lebih memilih menggunakan kekuatan militer daripada konsesi ataupun sebaliknya. Wang juga mempunyai pendapat tentang dua aspek diatas bahwa wilayah mempunyai nilai khusus untuk negara dalam pengaturan sejarah maupun tatanan internasional. Namun penerapan nilai ini akan berbeda antar satu negara dengan yang lainnya walaupun dalam satu waktu yang sama ataupun suatu negara di waktu yang berbeda. Sehingga Ke Wang mengambil hipotesa bahwa kebijakan teritorial kooperatif akan terjadi apabila nilai ekonomi wilayah meningkat dan akan mewujudkan penyelesaian sengketa damai, namun kebijakan eskalasi kemungkinan terjadi apabila nilai simbolik atau militer meningkat dan akan berujung pada penyelesaian yang cenderung lama bahkan

konflik bersenjata. Sementara untuk implementasi konsep ini di sengketa perbatasan Tiongkok-India akan dibahas dalam dua aspek besar yakni pembahasan tiap sektor (timur, tengah, barat) dan tiap nilai (ekonomi, simbolis, militer) (Wang K. , 2014, pp. 1-6).

Penelitian diatas mempunyai perbedaan yang mendasar dibandingkan penelitian yang saya tulis. Peneletian yang saya tulis membahas tentang faktor penghambat dalam dinamika proses diplomasi dan negosiasi sengketa perbatasan Tiongkok-India. Penelitian pertama yang ditulis Liu Xuecheng hanya spesifik membahas tentang Implementasi *Confidence Building Measures* (CBMs) dan klarifikasi *Line of Actual Control* (LAC). Pembahasan tersebut hanya salah satu faktor dari penghambat proses negosiasi dalam sengketa perbatasan. Penelitian kedua oleh Monika Chansoria lebih spesifik membahas tentang analisis efektifitas CBMs dalam proses negosiasi sengketa perbatasan. Sementara penelitian ketiga oleh Shashank Koshi membahas tentang sikap keras dan tidak konsisten Tiongkok terhadap upaya penyelesaian sengketa perbatasan. Penelitian ini tidak membahas secara keseluruhan proses diplomasi namun hanya salah satu faktor penghambat proses diplomasi. Sementara penelitian keempat oleh Stephen Westcott membahas pengaruh *State Prestige* dalam proses negosiasi sengketa perbatasan. Terakhir penelitian kelima oleh Ke Wang lebih menekankan sikap tegas negara untuk menolak perubahan status quo dalam sengketa perbatasan.

## **1.7 Kerangka Teori**

### **Issue Linkage**

Guna mendukung argumen dalam artikel ini penulis menggunakan konsep *Issue Linkage*. Giovanni Maggi memberikan definisi atas konsep ini yakni mempertimbangkan dua bidang masalah oleh dua aktor (negara) yang mencoba bekerja sama melalui perjanjian internasional (misal perdagangan dan lingkungan). Dapat dikatakan *issue linkage* jika perjanjian yang dilaksanakan mempengaruhi satu isu sama lain (Maggi, 2016, pp. 513-514). Sementara Mugasejati juga menambahkan bahwa *Issue Linkage* merupakan cara untuk menghubungkan satu ranah isu dengan isu yang lainnya dimana masing-masing pihak akan mendapatkan apa yang mereka ingin capai. Cara ini lebih mudah dan pragmatis dalam kerjasama internasional dengan saling membuat kompensasi (Mugasejati & Rais, 2011, p. 21). Terdapat aspek yang digunakan dalam konsep ini yakni menentukan *linker* (pihak yang memberi tawaran barter isu satu dengan yang lainnya) dan *linkee* (pihak yang menerima tawaran). (Mugasejati & Rais, 2011, p. 22).

Beberapa peneliti menjelaskan konsep ini lebih kompleks dengan menggabungkan beberapa literatur di ranah isu keamanan dan kawasan perbatasan. Faktor geografis menjadi sumber keterkaitan antara dua negara untuk menghubungkan satu ranah isu dengan yang lainnya (Warner, Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary Conflict and COoperation on the River Meuse, 2016, pp. 6-7). Kemudian ketika negara mengalami kebuntuan atau ingin memperbaiki posisi tawar maka keterkaitan ini menjadi jalan untuk menghubungkannya dengan isu lain yang bahkan tidak terkait. Keterkaitan ini dapat bersifat saling kooperatif, bersifat prospektif (berupa janji atau ancaman) ataupun retrospektif (hadiah dan pembalasan). Sementara

dari sudut pandang fungsionalis maka aspek menentukan apakah hubungan antar isu ini akan mengarah pada kesepakatan atau justru ke arah *negative linkage* yang terlalu memaksa satu pihak dan akan merusak hubungan seluruhnya (Bow, 2009, pp. 1-5).

Warner juga memberikan beberapa pandangan untuk memetakan hubungan antar negara. Realisme digunakan sebagai pendekatan berdasar kekuatan, negara diasumsikan sebagai aktor utama dan bertindak secara rasional untuk mendapatkan kepentingannya. Kepentingan utama negara adalah keamanan nasional dan hal ini memotivasi negara untuk membenarkan segala tindakan demi kepentingan tersebut. Interdependensi dilihat sebagai hal yang negatif dalam realisme karena negara yang mempunyai kekuatan lebih besar akan memaksakan kepentingannya terhadap negara lain. Sementara Liberalisme digunakan sebagai pendekatan berdasar kepentingan yang menempatkan kekuasaan atau hegemoni dalam posisi sekunder dan lebih didominasi pada perhitungan rasional kepentingan nasional. Menekankan pentingnya persepsi bahwa dalam interdependensi pada akhirnya dapat disejajarkan. Namun akan cenderung pada kepatuhan aktor di satu area karena takut pembalasan di area lainnya dan memaksa pada sebuah paket kesepakatan. Terakhir Integrasionalisme yang menekankan pentingnya konteks dengan adanya berbagai keterkaitan isu dapat mengurangi kegunaan militer. Namun masalah perbatasan menciptakan hal yang samar untuk memisahkan antara politik tinggi dan rendah (Warner, 2016, pp. 2-5).

Issue Linkage tidak selalu mengarah keterkaitan yang positif (kerjasama) namun juga bisa kearah negatif (konflik). Hubungan antar negara khususnya dalam keamanan begitu kompleks dengan memprediksi kemajuan dari konflik ke kerjasama



ataupun sebaliknya. Isu yang masuk dalam agenda dilaksanakan oleh aktor yang berbeda dengan pendekatan yang berbeda sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda. Hal ini menentukan hubungan antar negara ke arah kerjasama atau bahkan konflik. Ditandai dengan tidak adanya kekuatan dan tidak ada hirarki antara satu isu dengan lainnya. Interdependensi secara asimetris dapat menguntungkan salah satu pihak, A lebih bergantung pada B dan memberikan B pengaruh untuk memberikan tekanan dan mengendalikan hubungan kedua belah pihak (Warner, 2016, p. 6).

Warner mengimplementasikan konsep ini kedalam kasus sengketa perbatasan di kawasan Sungai Meuse antara Belanda dan Belgia. Sengketa perbatasan ini dilatarbelakangi oleh aksi klaim wilayah sungai Meuse yang mengalir di sepanjang garis perbatasan kedua negara. Sungai ini disengketakan karena beberapa hal seperti jalur kapal dagang, sumber daya air bagi kedua negara (pertanian, air minum & pembangkit tenaga listrik), pusat pertambangan batubara dan kawasan pos penjagaan peredaran narkoba & sex (Warner, *Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary Conflict and COoperation on the River Meuse*, 2016, p. 8). Perjanjian awal tentang tata kelola sungai bersama dimulai pada tahun 1863. Namun perjanjian ini tidak efektif karena pada tahun 1921 kedua negara semakin mempertegas klaim dengan membangun kanal, kanal Juliana oleh Belanda dan kanal Albert oleh Belgia. Sehingga pada tahun 1936 dibawa ke Mahkamah Internasional walaupun hasilnya klaim kedua negara ditolak (Warner, *Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary Conflict and COoperation on the River Meuse*, 2016, p. 10).

Pasca Perang Dunia kedua aksi klaim semakin melebar dengan melibatkan isu ekonomi didalamnya. Benelux Economic Union yang dibangun untuk integrasi ekonomi negara tetangga (Belanda, Belgia, Prancis) akhirnya mulai runtuh karena aksi klaim yang terjadi di Sungai Meuse. Aksi klaim dengan pembangunan kanal semakin membesar khususnya oleh Belgia. Hal ini mengakibatkan luapan dan banjir ke wilayah Belanda. Hal ini berujung pada pembentukan perjanjian tahun 1963 yang mengharuskan Belgia memberikan kompensasi ke Belanda dan membangun bendungan penahan air (Warner, *Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary Conflict and COoperation on the River Meuse*, 2016, p. 11).

Perpecahan di politik domestik Belgia juga mempengaruhi pengambilan keputusan khususnya dalam Konvensi Air tahun 1975. Belgia akhirnya tidak ikut menandatangani draft tersebut sehingga menghambat proses negosiasi. Hingga akhirnya UNECE melibatkan Prancis sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan urusan BEU dan Draft Konvensi Air antar kedua negara. Pada tahun 1999 dibentuk konvensi Perlindungan Meuse yakni International Commission on the Protection of the Meuse (ICMP) dan Scheldt (ICPS) yang kemudian dibentuk juga The International Meuse Commission (IMC) pada tahun 2000. Namun ini tidak efektif karena kedua negara masih belum mau bekerjasama karena dampak turunnya ekonomi akibat banjir bandang (Warner, *Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary Conflict and COoperation on the River Meuse*, 2016, p. 12).

Aksi masa besar-besaran yang memprotes ketidakpuasan keputusan antar kedua negara yang masih mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Ekonomi semakin

menurun akibat aksi klaim yang terus terjadi di Sungai Meuse ditambah dengan luapan sungai yang mengakibatkan banjir bandang. Aksi dari Belgia diperparah dengan kisruh perpecahan kubu di politik domestik. Kemudian Bewoners Overleg Maaswerken (BOM) dibentuk sebagai forum guna membahas masalah ekonomi, AMDAL di wilayah sungai Meuse dan administratif lainnya (Warner, *Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary Conflict and COoperation on the River Meuse*, 2016, p. 13).

Terdapat beberapa pembagian konsep *Issue Linkage* yang dapat digunakan sebagai dasar analisis khusus membahas tentang isu kawasan perbatasan. Menurut Gupta dikutip dari (Warner, 2016, pp. 6-7)

- Material linkages/ Keterkaitan material: isu yang secara logis saling terkait sehingga tidak dapat dipisahkan atau isu yang menjadi dasar penghambat negosiasi.
- Political linkages/ Keterkaitan politik: aspirasi negara, keamanan nasional, aspirasi regional, klaim territorial.
- Bargaining linkages/ Keterkaitan tawar menawar: konstruksi buatan yang menghubungkan isu-isu yang tidak terkait.
- Organisational and procedural linkages/ Keterkaitan organisasi dan prosedural: tempat tertentu (forum, pengaturan) atau waktu negosiasi dapat mempromosikan atau menghambat kemajuan dibidang lain.
- Conceptual linkages/ Keterkaitan konseptual: definisi yang disepakati dalam satu konteks/ isu dapat mendorong kemajuan di isu lain.

Pendekatan ini tidak hanya mengarah pada isu yang terkait (*linkage*) namun juga isu yang tak terkait (*non-linkage*). Memang pada akhirnya kompleksitas ini tidak hanya menghasilkan penundaan namun juga konflik, kekakuan bahkan stagnansi. Namun tidak seluruh isu yang terlibat mempunyai pengaruh terhadap isu utama yang sedang berlangsung. Hal ini karena ambiguitas yang muncul dalam keterkaitan antar isu yakni bersifat aktif atau tidak dengan melihat posisi tawar (Warner, 2016, pp. 21-22).

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Metode Kualitatif**

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif deskriptif dimana metode ini menggunakan studi pustaka terhadap subjek yang diteliti. Studi pustaka yang digunakan akan berkaitan dengan kegagalan terhadap resolusi sengketa perbatasan antara Tiongkok dan India sejak ditandatanganinya perjanjian tahun 2005 hingga momentum peristiwa *Docklam Standoff 2017*. Penelitian kualitatif sendiri diartikan sebagai penelitian ilmiah yang digunakan untuk menemukan makna (*meaning*), proses dan konteks dari sebuah perilaku atau peristiwa sosial yang sedang diamati. Kemudian menghasilkan data non numerik yakni data yang sifatnya verbal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bervariasi mulai dari yang terstruktur hingga yang tak struktur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara interpretif, subjektif, impresionistik dan diagnostik (Bakry, 2016, pp. 18-19). Berdasar studi pustaka yang telah dilakukan, belum ditemukan kajian yang membahas tentang

kegagalan perundingan/ resolusi penyelesaian sengketa perbatasan antara Tiongkok dan India sejak perjanjian tahun 2005 hingga peristiwa *Docklam Standoff 2017*.

### **1.8.2 Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah proses perundingan yang dilakukan oleh Tiongkok dan India selama periode 2005 hingga 2017 baik yang berbentuk negosiasi ataupun perjanjian yang telah ditandatangani. Sementara Tiongkok dan India berlaku sebagai aktor utama yang menjadi pelaku dalam setiap negosiasi ataupun perjanjian yang dilakukan.

### **1.8.3 Alat Pengumpul Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kajian-kajian tertulis berupa buku cetak, e-book, jurnal ilmiah, dokumen resmi institusi dan artikel di internet. Penelusuran kajian pustaka khususnya buku cetak juga dilakukan di perpustakaan – perpustakaan yang ada di Yogyakarta. Kajian yang dikumpulkan tentunya akan berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diambil dari dokumen resmi pemerintah yang tersedia di laman resmi institusi seperti situs resmi pemerintahan China ataupun India yang terkait dengan penelitian ini. Sementara data sekunder berasal dari tulisan akademik berupa buku cetak, e-book, jurnal ataupun sumber yang berasal dari situs media internasional.

### **1.8.4 Proses Penelitian**

Terdapat beberapa tahap yang dilakukan ketika seluruh data telah terkumpul untuk dianalisis. Tahap awal yakni melakukan pengkajian data yang terkumpul untuk

mendapatkan informasi mengenai topik yang dibahas agar dapat menemukan suatu gagasan kesimpulan. Kemudian pembagian gagasan yang terkumpul berdasar kajian data dicatat secara terstruktur. Tahap selanjutnya melakukan pembagian gagasan yang didapat dari kajian berdasar kesimpulan per pembahasan melalui beberapa sub bab yang diurutkan secara terstruktur sesuai waktu. Kemudian penjelasan secara mendetail secara deskriptif dari hasil pembagian per sub bab. Tahap terakhir hasil pemikiran atau interpretasi dari temuan dan deskripsi yang telah dilakukan sehingga terbentuk sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian (Cresswell, 2014, pp. 49-50)

